

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Senin Tanggal: 09 Desember 2019 Halaman: 2

TAHUN DEPAN USULKAN TIGA RTHP

Lahan untuk Kelurahan Gunungketur Terancam Gagal

YOGYA (KR) - Rencana pembelian lahan yang akan digunakan untuk kantor Kelurahan Gunungketur Pakualaman terancam gagal terbeli. Hal ini lantaran pemilik lahan dengan Pemkot Yogya tidak mencapai kesepakatan harga sesuai hasil apraisal.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya Hari Setyawacana, menjelaskan pada APBD Perubahan 2019 pihaknya menambah alokasi pembelian lahan mencapai Rp 49 miliar. "Peruntukannya untuk tujuh lokasi. Masing-masing kantor Kelurahan Gunungketur, Puskesmas Pakualaman sekaligus Kelurahan Purwokinanti, pengembangan kantor Kelurahan Suryatmajan, serta ruang terbuka hijau publik (RTHP) di empat wilayah yakni Prenggan, Giwangan, Keparakan dan Suryatmajan," urainya, Minggu (8/12).

Diakuinya, untuk kantor Kelurahan Gunungketur tidak bisa direalisasikan karena tidak ada titik temu mengenai harga tanah. Jika akhimya gagal terbeli, pihaknya pun tidak akan mengalokasikan anggaran di tempat yang sama pada tahun depan. Diupa-

yakan berganti lokasi namun masih berada di kelurahan yang sama.

Kantor Kelurahan Gunungketur pada saat ini dinilai kurang representatif. Upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Hari mengaku tengah berkoordinasi dengan Puro Pakualaman guna meminta surat kekancingan di bekas kantor Kecamatan Pakualaman.

"Sekarang bekas Kecamatan Pakualaman dipinjam untuk kantor sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya," imbuhnya.

(DLH) Kota Yogya, imbunnya.
Sementara itu terkait kegiatan
pengadaan lahan di tahun depan, pihaknya sudah mengusulkan tiga lahan untuk RTHP. Masing-masing ber-

ada di Sorosutan, Ngampilan, dan Pakuncen. Mekanisme pengadaan lahan tersebut tetap sama, yakni di dahului pengajuan proposal dari wilayah. Sedangkan nilai penawaran akan disesuaikan dengan hasil apraisal yang dilakukan oleh tim independen.

Hari mengaku, sebagian besar pemilik lahan menawar dengan harga pasar. Hal itu yang kerap menjadi penyebab gagalnya kegiatan pengada-an lahan yang diampu oleh pemerintah. "Tapi jika warga mengetahui kelak lahannya akan digunakan untuk fasilitas publik, justru bangga. Kemudian merelakan dengan harga hasil penilaian atau apraisal," tandasnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Pakualaman	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Gunungketur			
3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan			

Yogyakarta, 20 Januari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005